

PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PENCEGAHAN KONFLIK DI PROVINSI DKI JAKARTA: STUDI KASUS PILGUB TAHUN 2017

THE ROLE OF NATIONAL UNITED AND POLITICS BOARD TOWARD THE CONFLICT PREVENTION IN JAKARTA PROVINCE : CASE STUDY ON GOVERNOR ELECTION 2017

Alfian Rizanurra Asikin¹, Setyo Harnowo², Margaretha Hanita³

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan

(alfianbinasikin@gmail.com)

Abstrak -- Jakarta adalah episentrum pemerintahan, politik, bisnis dan ekonomi di Indonesia. Sehingga Jakarta menjadi wilayah multi etnis, suku, bangsa dan agama. Selain menjadi modal sosial hidup rukun, kondisi ini memiliki potensi benturan antar identitas. Indeks Demokrasi Indonesia sejak tahun 2014 mencatat Jakarta sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia. Namun, pilgub DKI Jakarta 2017 menghasilkan ketegangan di masyarakat akibat isu SARA dan tindakan penistaan agama. Masyarakat pun terpolarisasi berdasarkan pilihan politik dan terjadi gerakan massa. Konflik dan tindak kekerasan pun terjadi, misalnya penolakan kampanye, penolakan mensholati jenazah pendukung pasangan lain. Akibatnya indeks demokrasi Jakarta tahun 2016 turun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik yang muncul pada pelaksanaan pilgub tahun 2017 serta bagaimana peran yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam melakukan upaya pencegahan konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari informan yang ditetapkan, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan konflik dilakukan secara sinergi pemerintah daerah dan stakeholder terkait, sehingga potensi konflik dapat terdeteksi dan diredam sejak dini. Hasilnya di tengah polarisasi yang terjadi, pilgub berjalan aman dan lancar dengan tingkat partisipasi pemilu 75 – 77 % dari total DPT. Kesimpulan penelitian ini antara lain potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 meliputi isu SARA dan penistaan agama, netralitas ASN, profesionalitas penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu serta konflik kepentingan dan kekuasaan. Adapun peran Bakesbangpol dalam pencegahan konflik pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terdiri dari meredam potensi konflik dan membangun sistem deteksi dan peringatan dini konflik. Kata kunci: peran, badan kesatuan bangsa dan politik, pencegahan, konflik, pemilihan gubernur

Abstract -- Jakarta is government, politics, business, and economic epicentrum of Indonesia. Thus, Jakarta becomes multi-ethnic, tribe, and religion. In addition for being social capital in living in harmony, this condition has potential conflict among identities. Since 2014, Indonesia Democratic Index showed that Jakarta is the most democratic province in Indonesia. However, Governor election

¹ Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan (Cohort 6).

² Laksamana Muda TNI (Purn) Prof. Dr. Setyo Harnowo, drg., Sp.BM(K), FICD, FCCDE adalah dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus pembimbing pertama penelitian.

³ Dr. Margaretha Hanita, S.H., M.Si. adalah dosen Universitas Pertahanan sekaligus pembimbing kedua penelitian.

in 2017 occurred high tension in the society caused by SARA issue and religion insults. Finally, the society was polarized based on the political choice and occurred mass movement. Conflict and violence occurred, such as campaign rejection and rejection of praying to bones which support other governor candidate. This caused the decrease of Jakarta Democratic Index in 2016. This research aims to analyze potential conflict may appear on Governor election in 2017 and how the role of National United and Politics Board to prevent the conflicts. The research uses qualitative method and using case study approach. The data was obtained from determined informant, then analyzed with the qualitative technique. The research result shows that the effort of conflict prevention was implemented in line between local government and involved stakeholders, so conflict potency can be detected and dimmed earlier. Thus on the polarized condition, government election run well with 75-77% recapitulation level of total DPT. The conclusion of the research is conflict potency on Jakarta Governor election 2017 involved SARA issue and blasphemy, public servant neutrality, professionalism of election organizers, and conflict of interest and sovereignty. Then, the role of Bakesbangpol in involving conflict prevention in Jakarta Governor election consisted of muffling potential conflict, creating detection system, and conflict early warning.

Key words: role, national united and politics board, prevention, conflict, governor election

Pendahuluan

Jakarta memiliki daya tarik yang besar tidak hanya sebagai ibu kota negara namun juga sebagai pusat politik, ekonomi dan bisnis di Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, Jakarta sudah menjadi pusat ekonomi, politik, media, budaya dan pendidikan di Indonesia.⁴ Daya tarik ini membuat banyak suku bangsa nusantara memberanikan diri untuk mengadu nasib di ibu kota. Oleh sebab itu, Jakarta termasuk dalam provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar di Indonesia tercatat sejumlah 10.177.924 Jiwa pada tahun 2017.⁵ Jumlah yang besar ini membuat sosiologis masyarakat Jakarta menjadi multikultur.

Tercatat etnis dan suku bangsa yang mendiami Jakarta antara lain: Jawa, Betawi, Sunda, Tionghoa, Batak, Minang, Melayu, Bugis, Madura, Banten, Banjar, Minahasa dan lain-lain⁶. Kenaekaragaman etnis dan suku di Jakarta dapat menjadi modal besar dalam pembangunan baik politik maupun ekonomi, sekaligus rentan terjadi benturan dan dapat menjadi potensi konflik di kemudian hari jika tidak mampu dikelola dengan baik.

Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi terjadinya konflik. Konflik yang bermakna benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan individu atau

⁴ Sebagaimana diceritakan dalam bibliografi tentang Batavia, karangan Ebing dan Youetta de Jager terbitan KTLIV (2001). Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 3-6.

⁵ BPS DKI Jakarta. 2017. <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/24/913-1-2-jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html>

⁶ BPS DKI Jakarta. 2000

kelompok dengan pemerintah⁷. Konflik seakan tidak dapat lepas dari kehidupan sosial manusia termasuk di Jakarta. Tak heran Dahrendorf menyatakan bahwa konflik dilihat sebagai sesuatu yang endemik atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia dalam bermasyarakat.⁸

Jakarta mengalami penurunan indeks demokrasi dari 85,32 poin tahun sebelumnya menjadi 70,85 poin pada 2016⁹. Penurunan yang cukup signifikan ini disebabkan salah satunya akibat terjadinya isu SARA (terlebih setelah terjadi ungkapan penistaan agama yang dilakukan oleh calon petahana) disertai mobilisasi demo massa, juga kekerasan fisik maupun non fisik selama pilgub.

Pencapaian ini terkonfirmasi temuan Poltracking Indonesia per Februari 2017, menyebutkan bahwa dari 800 Responden, didapatkan hasil 24.11% responden masih bisa berubah pilihan. *Undecided voter* ini akan terpengaruh oleh isu di media sosial sebanyak 21.39%, terpengaruhi visi, misi dan program kerja pasangan calon sebanyak 12.24%. Adapun terkait latar belakang aktor penentu pilihan kandidat, 2 besar hasilnya

berupa latar belakang agama sebanyak 27.77% dan faktor kinerja sebesar 26.28%¹⁰. Hasil survei ini menandakan bahwa identitas agama menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Jakarta merupakan wilayah yang sangat heterogen dan multikultur, namun rentan terhadap konflik dan budaya kekerasan. Sesuai dengan penjelasan Susan, bahwa masyarakat Indonesia masih tergolong *vulnerable society* (masyarakat rentan) diantaranya karena tingginya segregasi sosial, serta rendahnya keterampilan partisipasi politik demokrasi.¹¹

Bawaslu pun merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, dan menempatkan DKI Jakarta pada posisi ke 5 dari 7 Daerah terawan penyelenggaraan pemilu tahun 2017¹². Disebutkan bahwa dimensi yang memiliki kerawanan dalam pilkada DKI Jakarta adalah dimensi kontestasi dengan variabel kerawanan tinggi berada pada

⁷ Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992

⁸ Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Hlm. 55

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/12240901/indeks-demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya>

¹⁰ Laporan Survei Pilgub DKI Jakarta. Persepsi dan perilaku pemilih menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. 6-10 Februari 2017. Poltracking Indonesia. Dapat diunduh di www.poltracking.com

¹¹ Susan, Novri. 2009. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Prenada Media. Hal. 2

¹² Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, Bawaslu RI,

variabel pencalonan, kampanye, dan kontestasi¹³.

Ketegangan akibat polarisasi politik yang terjadi kemudian membuat fenomena identitas sosial di masyarakat terbentuk. Berawal dari proses kategorisasi sosial hingga bentuk *in group out group*. Akhirnya terjadi komparasi antar kelompok yang membuat persepsi. Hal ini dijumpai pada kasus penolakan menyolatkan mayat pendukung Basuki yang meninggal. Demonstrasi berskala besar dan membawa identitas agama seperti 411 dan 212 pun menjadi *trigger* bagi ketegangan yang ada.

Akan tetapi, pada pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pilkada DKI Tahun 2017 tidak terjadi eskalasi konflik yang meningkat hingga konflik kekerasan, bahkan cenderung proses de-eskalasi. Sehingga Pilgub DKI Jakarta dapat dilalui dengan aman dan damai, sejak pemungutan suara sampai penentuan pemenang Pilgub DKI Jakarta. Hal ini terjadi salah satunya adalah peran aktif pemerintah daerah dengan seluruh pihak yang terkait dalam melakukan upaya pencegahan konflik pada pilkada DKI Tahun 2017.

Terbukti, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui badan kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab melakukan

penanganan konflik sosial di DKI Jakarta termasuk di dalamnya permasalahan konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta. Upaya ini sebagai bentuk implementasi UU No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam Pencegahan Konflik pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017” menjadi penting untuk dilakukan dan diharapkan mampu mengkaji lebih dalam serta memberikan kontribusi dalam menciptakan strategi keamanan nasional terutama di wilayah DKI Jakarta untuk masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Secara umum desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini merupakan penelitian untuk melihat peran yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik di DKI Jakarta dengan studi kasus pada saat pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta tahun 2017.

Penelitian dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi DKI Jakarta. Penelitian dilaksanakan dari bulan September hingga November 2018. Teknik

¹³ Rikson H. Nababan. 2016. Jurnal Bawaslu DKI. Edisi Oktober 2016 hal. 50.

Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Teknik penentuan narasumber berupa *purposive snowball sampling*. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, sumber dan Expert Opinion.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dipilih karena analisis ini langsung menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan kondensasi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Sehingga peneliti dapat melakukan analisis studi kasus secara mendalam mengenai peran pencegahan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam pilgub DKI Jakarta tahun 2017, sehingga dapat diambil kesimpulan tentang potensi konflik yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan peran pencegahan yang dilakukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah DKI Jakarta adalah seluas 662,33 km² daratan dan 6.977,5 km² lautan¹⁴. Sebelah utara Jakarta membentang pantai sepanjang 35 km. Di sebelah selatan dan timur Jakarta berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa¹⁵.

Menurut data dari data.jakarta.go.id tahun 2016, penduduk DKI Jakarta berdasarkan agama, dengan rincian: Islam (8,6 Juta), Kristen 888,8 ribu, Katholik 411,7 ribu, Budha 385,9 ribu, Hindu 19,4ribu, Konghucu 1.200, Aliran kepercayaan 226 jiwa.¹⁶

Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2017 tercatat berdasarkan proyeksi penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0.94 persen. Sementara itu, memperhatikan jumlah penduduk pada tahun 2017 dan dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka diketahui tingkat

¹⁴ Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No 171 Tahun 2007.

¹⁵ Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012.

¹⁶ Beritagar.id. "Populasi Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Agama". tersedia di: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/populasi-penduduk-dki-jakarta-berdasarkan-agama-1520252043> (diakses pada oktober 2018)

kepadatan penduduk pada tahun 2017 mencapai 15.663 per 1 km², dengan Jakarta Barat sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi dengan 19.516 jiwa/ km² dan Kepulauan Seribu sebagai wilayah dengan kepadatan terendah dengan 2.747 jiwa/ km².

Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan penduduk DKI Jakarta didominasi oleh suku Jawa (3,453 juta jiwa), Betawi (2,7 juta jiwa), Sunda (1,395 juta jiwa), Tionghoa (632 ribu jiwa) dan Batak (327 ribu), dan etnis lainnya seperti Minang, Melayu, Madura, Palembang, Bugis, Maluku, Papua dan lain-lain.¹⁷

Jumlah penduduk miskin Jakarta berdasarkan data BPS pada tahun 2017 menjadi 393.130 jiwa (3,78%). Adapun Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2017 masing-masing sebesar 0,52 persen dan 0,10 persen. Data kemiskinan yang diolah, menunjukkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin mulai dari paling banyak hingga paling sedikit yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu.

Tingkat kriminalitas Jakarta dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya, juga tingkat penduduk miskin dan tidak sekolah. Tercatat pada tahun 2017 terjadi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 8647 kasus kejahatan, dengan rincian wilayah tingkat kriminalitas terbanyak Jakarta Barat (1990 kasus), Jakarta Selatan (1858 kasus), Jakarta Pusat (1621 kasus), Jakarta Utara (1564 kasus), Jakarta Timur (1561 kasus), dan Kepulauan Seribu (53 kasus). Maka tidak heran apabila kerawanan kriminalitas yang terhimpun berdasarkan wilayah tidak jauh berbeda hasilnya dalam faktor lainnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai potensi konflik yang dapat timbul pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Indeks pembangunan manusia (IPM) berdasarkan wilayah di DKI Jakarta, menunjukkan wilayah paling tinggi IPM nya tahun 2017 sampai paling rendah yaitu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.¹⁸ Melihat capaian pembangunan manusia DKI Jakarta yang sangat tinggi, menandakan DKI Jakarta

¹⁷ BPS Republik Indonesia. "Kewarganegaraan penduduk Indonesia". Terdapat di: <http://Sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%indonesia/index.html> (diakses pada oktober 2018)

¹⁸ BPS Republik Indonesia. "Data DKI Jakarta 2017 (Metode Baru)". Tersedia di: <http://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/310> (Diakses pada oktober 2018)

sebagai wilayah yang sangat baik dalam pengembangan pembangunan manusia.

Berdasarkan capaian indeks pembangunan manusia, Jakarta yang sangat tinggi dan jumlah penduduk miskin yang semakin mengecil dari total populasi, menandakan bahwa Jakarta cukup baik dalam pengembangan pembangunan manusia. Selain itu, Jakarta berhasil menciptakan masyarakat ekonomi kelas menengah. Jakarta memiliki masyarakat ekonomi kelas menengah atas tertinggi di Indonesia.¹⁹ Kondisi dan perilaku kelompok ini pada akhirnya sangat menentukan peta politik di Jakarta.

Gambaran Umum Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017

Pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 ini diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pasangan terdiri dari satu pasang petahana dan dua pasang penantang. Pasangan Agus H. Yudhoyono – Sylviana Murni, pasangan Basuki T. Purnama – Djarot S. Hidayat, dan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga S. Uno.

Semua pasangan calon ini didukung oleh partai politik dan tidak ada yang maju

sebagai pasangan independen, sebagaimana yang diperbolehkan oleh aturan pemilihan kepala daerah.

Tabel Partai Pengusung Pasangan Calon Pilgub DKI Jakarta tahun 2017

	Agus H. Yudhoyono – Sylviana Murni	Basuki T. Purnama – Djarot Syaiful	Anies Baswedan – Sandiaga Uno
Partai Pengusung	Demokrat, PKB, PPP dan PAN,	PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura	Gerindra, PKS

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

Dari total penduduk DKI Jakarta yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2017 yang dirilis KPU provinsi DKI Jakarta adalah sejumlah 7 juta jiwa, dengan rincian putaran pertama 7.108.589 dan putaran kedua 7.318.280²⁰. Dari jumlah DPT DKI Jakarta, tercatat wilayah Jakarta Timur memiliki jumlah DPT terbanyak dengan 2 juta jiwa dan Kepulauan Seribu yang paling sedikit dengan 17,7 ribu. Total yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 75,75% pada putaran pertama dan 77,08%. Sedangkan sekitar 1,6 juta jiwa penduduk yang masuk dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.

¹⁹ Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, hal. 4

²⁰ Data dan Infografik Pilkada Jakarta 2017. KPU Provinsi DKI Jakarta

No	Kab/Kota	Pemilukada Gubernur			Jumlah
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan hak pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kepulauan Seribu	14,187	168	3,511	17,866
2.	Jakarta Selatan	1,214,304	14,057	402,999	1,631,360
3.	Jakarta Timur	1,605,266	18,267	436,596	2,060,129
4.	Jakarta Pusat	576,449	6,395	184,199	767,043
5.	Jakarta Barat	1,296,739	10,995	399,661	1,707,395
6.	Jakarta Utara	884,408	7,833	259,439	1,151,680
Provinsi DKI Jakarta		5,591,353	57,715	1,686,405	7,335,473

Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta

Gambar Jumlah surat suara pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 memberi kesempatan bagi pemilih pemula dan pemilih disabilitas, untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi yang terbuka, bebas, dan dapat diakses oleh seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali.

Tabel Komposisi Pemilih Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 per Kabupaten/Kota

Kota/Kab	Pemilih Total (L dan P)	Pemilih Pemula	Pemilih Disabilitas
Jakarta Barat	1.681.498	4.868	1.841
Jakarta Pusat	757.515	3.055	558
Jakarta Selatan	1.606.921	4.716	853
Jakarta Timur	2.025.157	5.349	1441
Jakarta Utara	1.129.494	3.542	306
Kep. Seribu	17.695	93	30

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

Melihat karakteristik demografis pemilih pada pilgub DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa pemilih di Jakarta memiliki berbagai karakteristik seperti pemilih yang rasional, psikologis dan sosiologis. Hal ini sejalan pendapat peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti, bahwa pemilih Jakarta tidak serta merta menentukan pilihan pada karena ketenaran atau jabatan yang dulu sempat diemban. Namun, warga butuh sosok calon yang memiliki gagasan dan mampu bekerja membangun Jakarta.²¹ Selain pemilih rasional, di Jakarta masih ditemukan pemilih psikologis dan sosiologis.²²

Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dilakukan dua putaran pemungutan suara. Pada putaran pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu: pasangan pertama adalah Basuki T. Purnama – Djarot S. Hidayat, pasangan kedua adalah Anies Baswedan – Sandiaga S. Uno, dan pasangan ketiga adalah Agus H. Yudhoyono – Sylviana Murni.

Namun, dikarenakan tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara 50%+1 dari jumlah pemilih, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua. Putaran

²¹ Sarwanto, Abi. 2016. Pengamat: Tipe Pemilih DKI Jakarta Rasional. Online. Dapat diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160208202453-32-109613/pengamat-tipe-pemilih-dki-jakarta-rasional>

²² Zulfikar. 2016. Tiga Jenis Pemilih di Pilkada Serentak: Tipe Psikologis Pilih yang Gateng, Tegas, Santun. Dapat diakses di: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/11/tiga-jenis-pemilih-di-pilkada-serentak-tipe-psikologis-pilih-yang-gateng-tegas-santun>

kedua hanya diikuti oleh pasangan Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saepul Hidayat dan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno. Adapun pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni tidak dapat mengikuti putaran kedua karena perolehan suara yang paling kecil dari kompetitor lainnya.

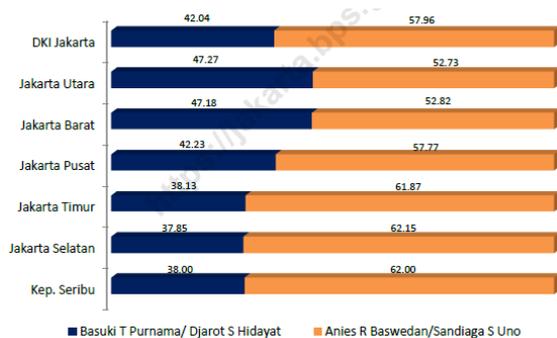
No	Pasangan Calon	Kep. Seribu		Jakarta Selatan		Jakarta Timur		Jakarta Pusat		Jakarta Barat		Jakarta Utara		Jumlah	
		Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni	3.891	27,26	177.363	14,77	309.706	19,42	101.744	17,67	203.107	16,11	142.142	16,53	937.955	17,05
2	Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	5.532	38,76	465.524	38,77	618.880	38,81	244.727	42,99	613.194	48,63	416.720	48,45	2.364.577	42,99
3	Anies Rasyid Saewand dan Sandiaga Salahudin Uno	4.851	33,98	557.767	46,46	665.902	41,76	222.814	39,14	444.743	35,27	301.256	35,02	2.197.333	39,95
Jumlah suara sah seluruh pasangan calon		14.274		1.200.654		1.594.490		569.285		1.261.044		860.118		5.499.865	

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

Gambar Perolehan suara putaran pertama pilgub DKI Jakarta tahun 2017

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

Hasil rekapitulasi resmi KPU Provinsi DKI Jakarta sudah final dan dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor: 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pilgub DKI Jakarta tahun 2017 putaran 2 tanggal 5 mei 2017, ditetapkan pasangan calon nomor urut 3.



²³ Data dan infografik Pilkada Jakarta 2017 hal 38

Gambar Perolehan suara putaran kedua pilgub DKI Jakarta tahun 2017

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

Pasangan Basuki Tjahja – Djarot unggul pada wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sedangkan pasangan Anies – Sandi, hanya unggul di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Akhirnya, pada putaran kedua pilgub DKI Jakarta secara keseluruhan pasangan Anies – Sandi memenangkan pertarungan di semua wilayah DKI Jakarta. Terlebih di lumbung suara pasangan Basuki – Djarot, suara yang didapat oleh pasangan itu cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan²³. Misalnya, Jakarta Utara 416.720 (1) 418.096 (2), Jakarta Barat 613.194 (1) 611.180 (2), dan Jakarta Pusat 244.727 (1) 243.574 (2).

Selain itu, banyak ditemukan laporan pelanggaran selama pilgub DKI Jakarta tahun 2017, sehingga Bawaslu provinsi DKI Jakarta merilis temuan dan laporan dugaan pelanggaran sejumlah 308 temuan dan laporan²⁴. Rincian ini terdiri dari 200 laporan dan temuan pada putaran pertama dan 108 pada putaran kedua. Pada putaran pertama terdiri dari: Panwaslu Provinsi 62 kasus, Panwaslu Jakarta Utara 37 kasus, Panwaslu

²⁴ Kompas.com. 2017. Ada 308 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada pilkada DKI 2017. Dapat

Jakarta Timur 31 kasus, Panwaslu Jakarta Barat 24 kasus, Panwaslu Jakarta Pusat 14, dan Panwaslu Kepulauan Seribu 13 kasus. Dari total 200 laporan dan temuan, diputuskan 78 bukan termasuk pelanggaran pemilu, 112 pelanggaran administrasi dan 2 pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Putaran kedua, tercatat 108 total temuan dan laporan, terdiri dari: Panwaslu Provinsi 29 kasus, Panwaslu Jakarta Timur 17 kasus, Panwaslu Jakarta Barat 16 kasus, Panwaslu Kepulauan Seribu 14 kasus, Panwaslu Jakarta Pusat 13 kasus, Panwaslu Jakarta Utara 11 kasus, dan Panwaslu Jakarta Selatan 8 kasus. Dari total laporan dan temuan, tercatat 69 temuan dan laporan tidak termasuk pelanggaran, 25 pelanggaran administrasi, 5 tindak pidana pemilihan, dan 1 pelanggaran kode etik.

Dugaan pelanggaran bervariasi, mulai dari pengeroyokan pada pendukung pasangan calon, penggunaan form c6 milik orang lain, memilih sebanyak dua kali, penerbitan form A5 bukan dari KPU, sampai pelanggaran administrasi dan alat peraga kampanye dari pasangan calon. Semua laporan dan temuan pelanggaran ditindaklanjuti dan dikaji oleh tim penegak hukum terpadu (Gakumdu) pilgub DKI

Jakarta yang terdiri dari Bawaslu, Polda Metro dan Kejaksaan.

Potensi konflik pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

Berkaca pada kondisi di lapangan dan analisis teoritis yang dilakukan, potensi konflik yang muncul pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 antara lain: a) isu SARA dan penistaan agama, b) perebutan kekuasaan dan politik; c) penyelenggaran pemilu; d) petahana dan netralitas ASN. Akan tetapi isu SARA dan kasus penistaan agama menjadi isu yang paling mempengaruhi pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Walaupun isu SARA tersebut hanya ditujukan kepada satu orang saja, yaitu Basuki T. Purnama.

Sejalan dengan pendapat Thung Ju Lan *et al.* bahwa setidaknya ada beberapa kondisi utama yang berpotensi konflik, misalnya: distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya ekonomi, masalah identitas adat dan kebudayaan, masalah penegakan hukum dan keadilan *legal justice*, dan disfungsi aparat keamanan.²⁵ Potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta, diketahui berdasarkan deteksi konflik, pemetaan

diakses di:
<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/03/19075161/Ada.308.temuan.dan.laporan.dugaan.pelanggaran.pada.pilkada.DKI.2017>

²⁵ Thung Ju Lan *et. al.* 2011. Panduan Implementasi Kebijakan tentang Kerangka Kerja Pencegahan Konflik. Jakarta. Penerbit Penelitian Politik LIPI, hal. 22

faktor, dan potensi konflik berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur (sebelum, saat dan setelah pemungutan suara).

Deteksi Konflik

Upaya pendeteksian potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dapat dilakukan dengan melakukan langkah seperti profil wilayah, latar belakang konflik, bentuk konflik dan de-eskalasi konflik.

Profil wilayah

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 tercatat berjumlah 10.374.235 jiwa. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2017 mencapai 15.663 jiwa per 1 km². Jumlah penduduk miskin Jakarta pada tahun 2017 tercatat 393.130 jiwa (3,78%) dari total jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta. Ajaibnya, jumlah populasi ini berkontribusi mengontrol 60 persen perputaran uang di Indonesia.²⁶

Keanekaragaman penduduk Jakarta terdiri dari suku Betawi, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Ambon, Cina, dan Arab dapat hidup berdampingan di Jakarta. Selain suku bangsa, Jakarta dihuni oleh berbagai macam latar agama, seperti Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan.

Latar Belakang konflik

Ketegangan perebutan kekuasaan di Jakarta sudah terjadi sejak pelaksanaan pilgub DKI 2014 silam, dimana pada putaran dua sudah terjadi polarisasi pemilih lebih tajam, antara pro Islam dan tidak pro Islam walaupun tidak sebesar pada pilgub 2017. Hal ini dikarenakan pasangan Fauzi Bowo – Nahrowi Ramli pasangan muslim. Sedangkan Joko Widodo – Basuki T. Purnama pasangan plural (muslim dan kristen).

Isu SARA berupa sentimen etnis dan agama digaungkan pada putaran kedua pilgub DKI tahun 2012 serta kekhawatiran masyarakat terhadap Joko Widodo meninggalkan DKI Jakarta dan maju dalam pilpres sehingga menyerahkan kepemimpinan kepada Basuki. Akhirnya setelah dua tahun menjabat gubernur, Joko Widodo melepaskan jabatan gubernur DKI Jakarta dan menyerahkan ke Basuki. Tidak lama dari pelantikan Basuki sebagai gubernur, 10 september 2014, Basuki melayangkan surat pengunduran diri sebagai kader partai Gerindra dan memilih tidak bergabung dengan partai manapun. Strategi ini membuat partai Gerindra, partai pengusung, merasa geram karena dikhianati.

²⁶ Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly

from Indonesia's Local Politics?. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 33, 1, hal. 3

Basuki menjabat gubernur dengan membuat kegaduhan di masyarakat, mulai dari kebijakan yang tidak sensitif konflik, gaya kepemimpinan yang keras dan tidak disukai oleh masyarakat, dugaan keterlibatan pada korupsi sampai bentrok kekerasan aparat dengan masyarakat korban penggusuran. Hal ini membuat LIPI menyatakan bahwa kepemimpinan Basuki di Jakarta ini mengabaikan kemanusiaan.

Basuki dan Jarot kembali mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Maka, isu SARA kembali mengemuka dan membesar. Respon publik pun semakin membesar akibat ucapan Basuki di Kepulauan Seribu yang diduga mengandung penistaan agama. Respon besar umat Islam ini dilakukan dengan cara yang massif dan terorganisir dari awal kejadian hingga penetapan vonis pidana bagi Basuki, dalam bentuk aksi 411, 212 bahkan beberapa aksi pengawalan sidang tersangka.

Bentuk Konflik, Fase Eskalasi dan De-Eskalasi Konflik

Bentuk konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 serta fase eskalasi dan deeskalasi konflik, dapat dilihat menggunakan kurva konflik Ramsbotham²⁷.

1. Fase Eskalasi

a. Perbedaan

Proses kategorisasi dan identifikasi dari identitas sosial. Kategorisasi ini mencari kesamaan identitas baik suku, agama, pekerjaan dan lainnya. Identifikasi, berkumpul dengan yang sekategori baik formal maupun informal.

b. Kontradiksi

Kelompok identitas masyarakat diaktivasi untuk meraih dukungan dan memenangkan persaingan. Komparasi *in group out group* terjadi. Akhirnya muncul stereotipe dan prasangka akibat identitas sosial. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok lebih besar berdasarkan preferensi politik.

c. Polarisasi

Masing-masing kubu pendukung menunjukkan sikap dukungannya secara terbuka. Polarisasi pada pilgub DKI Jakarta mengakibatkan tindakan diskriminasi dan memicu ucapan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki. Polarisasi ini menguat dengan terjadi beberapa gerakan umat Islam dalam bentuk aksi bela Islam dan *counter act*.

d. Kekerasan

²⁷ Ramsbotham, Oliver et al. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity press. Hal. 13.

Terjadi kekerasan berupa *socioculture in community* selama pelaksanaan pilgub DKI Jakarta, antara lain: *Prejudice/enemy images*, *Racism* dan *religious intolerance*. Kekerasan terbuka hanya kasus kecil pada pelaksanaan pilgub saja. Namun, impresi besar terjadi di media sosial. Dimana perdebatan panas pendukung pasangan calon, saling menjatuhkan, bahkan informasi fitnah, hoax atau *fake news*.

e. Perang

Tahapan ini tidak sampai terjadi pada pilgub DKI Jakarta

2. Fase De- eskalasi

a. Gencatan senjata

Persaingan pemilu berakhir di TPS dan memenangkan pasangan masing-masing. Janji presiden selepas aksi 411 yang memastikan proses hukum yang transparan pada kasus basuki juga menurunkan ketegangan. Selain itu, sejak awal semua pasangan calon dan tim sukses sudah menyepakati bersama untuk kampanye damai dan anti SARA, dipantau oleh pemerintah pusat, daerah, dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI.

b. Kesepakatan

Atas deklarasi damai tersebut, masing-masing kelompok saling menjaga diri

untuk tidak melakukan tindakan kekerasan satu sama lain dan mengutamakan dukungan dan perlawanan secara santun. Begitu juga dalam hal proses hukum yang menjerat Basuki, semua kelompok menghargai proses hukum dan mengawalinya.

c. Normalisasi

proses pemungutan suara Pilgub berjalan dengan lancar dan masing-masing calon legowo dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Pengadilan menetapkan Basuki Tjahja Purnama sebagai penista agama dan dijatuhi vonis 2 tahun penjara. Kondisi Jakarta semakin mereda dan kondusif.

d. Rekonsiliasi

Proses ini tetap berlangsung, gubernur terpilih mengakomodir semua pihak yang berselisih pada pilgub DKI Jakarta silam dalam programnya dan melibatkan semua masyarakat Jakarta. Serta pemerintah provinsi terus mengkampanyekan semangat persatuan dan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya.

Pemetaan Faktor

Pemetaan faktor konflik dapat dilakukan dengan menganalisis faktor struktural dan aktor sekuritisasi pada konflik.²⁸

Faktor Struktural Konflik

A. Faktor Struktural

Secara struktural, potensi konflik yang timbul pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah perebutan kekuasaan, pribadi dan kepemimpinan Basuki, serta ketidakadilan. Pada dasarnya sumber terjadinya konflik diawali dari kesenjangan dan ketidakadilan.

Dalam hal perebutan kekuasaan sebagai sumber daya yang terbatas menjadi faktor mendasar terjadinya konflik. hal ini sejakan dengan pandangan dahrendorf bahwa sejatinya politik adalah konflik itu sendiri. Karena kekuasaan memiliki pengaruh yang besar namun hanya bisa diraih oleh kalangan terbatas, maka setiap kelompok akan berlomba-lomba melakukan berbagai strategi dalam merebut sumber daya terbatas itu demi kelangsungan kepentingan mereka.

Adapun gaya kepemimpinan, Basuki yang keras, kasar dan mementingkan progress tidak bisa diterima oleh penduduk DKI Jakarta. Ketidaksukaan masyarakat terhadap pribadi dan gaya kepemimpinan Basuki bagaikan bom waktu yang menunggu tiba waktu ledak. Analisis dari Ian Wilson dari murdoch university menyebutkan bahwa kekalahan ahok (Basuki) pada pilgub adalah ketidaksukaan rakyat kecil kepemimpinan ahok yang beda dari kepemimpinan Joko Widodo.²⁹

Selain itu, ditambah kebijakan yang dilakukan oleh Basuki yang mendapat penilaian buruk, seperti penggusuran sampai reklamasi. Kebijakan tersebut mengorbankan masyarakat miskin Jakarta dan dirasa menghilangkan prinsip keadilan dan Hak asasi manusia. Rilis LBH Jakarta (13/4/2017) menyebutkan taun 2016 rekor penggusuran dipecahkan kepemimpinan Basuki Tjahja sebagai gubernur DKI Jakarta dengan 25.533 korban penggusuran. Rincian korban penggusuran paksa ini 193 kasus, 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha.³⁰

²⁸ Program peace Through Development dan Institut Titian Perdamaian. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia. Jakarta: Peace Through development – BAPPENAS, hlm. 31.

²⁹ Hidayat, Avit. 2017. Penyebab Ahok Kalah versi Dua Peneliti Australia. Online. Dapat diakses di:

<http://www.pilkada.tempo.co/amp/868728/penyebab-ab-ahok-kalah-versi-dua-peneliti-australia..>

³⁰ Sari, Nursita. 2017. LBH Jakarta: Ahok Mungkin Pecahkan Rekor Penggusuran oleh Pemprov DKI. Online. Dapat diakses di: www.megapolitan.kompas.com/read/2017/04/13/13

B. Faktor Triger

Faktor triger yang menjadi sumber terjadinya konflik pada pilgub DKI Jakarta adalah isu SARA dan Respon Basuki Tjahja yang menistakan agama. Isu SARA sebagai bagian strategi politik identitas ini sudah dilakukan sejak pilgub DKI Jakarta tahun 2012 dan diulangi kembali pada pilgub DKI Jakarta kali ini. Marcus Mietzner, peneliti ANU Australia, menegaskan bahwa isu agama dan politik identitas sudah lama digunakan dalam pemilu Indonesia.

Kenyataannya menurut riset Mietzner, bahwa peta politik warga Jakarta adalah 40% pemilih konservatif, 35% pemilih plural dan sisanya *swing voters*. Massa inilah yang terpengaruh dengan isu penistaan agama dan gaya kepemimpinan Basuki.

Fenomena cukup banyaknya pemilih non rasional di Jakarta sangat dipengaruhi bukan hanya karena kinerja tapi ada faktor lain yang bersifat emosional, individual, dan penilaian negatif. Hasil survey yang dilakukan oleh median membuktikan alasan pemilih non rasional tidak memilih Basuki Tjahja,

antara lain: tidak suka ahok karena Ahok tidak bisa menjaga kata-kata (28%), Ahok penista agama (10,7%), Ahok pribadi yang arogan (9,3%) dan Ahok non muslim (5,7%).³¹

C. Faktor Akselerator

Akselerator konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah kampanye isu SARA (*negative* dan *black campaign*) di media sosial dan demonstrasi masyarakat (umat islam) akibat penistaan agama.

Tercatat tujuh gerakan dan demonstrasi aksi bela islam yang dilakukan oleh umat islam sejak kasus dilaporkan ke kepolisian sampai keputusan sidang pengadilan negeri Jakarta Utara berupa vonis dua tahun penjara oleh majelis hakim pada 9 mei 2017.

Selain aksi massa, panasnya kampanye dengan tema dan bahasan isu SARA di dunia maya dan media sosial pun mempengaruhi konflik pilgub DKI Jakarta. Tercatat fenomena penggunaan internet dan media sosial sebagai alat kampanye oleh masyarakat baik dalam bentuk *positive campaign*, *negative campaign* maupun *black campaign*.

405181/lbh.jakarta.ahok.mungkin.pecahkan.rekor.penggusuran.oleh.pemprov.dki

³¹ Mashabi, Sania. 2017. Survei: Ahok dianggap paling kompeten, tapi warga ogah memilih. Online. Dapat

diakses di: <http://merdeka.com/amp/politik/survei-ahok-dianggap-paling-kompeten-tapi-warga-ogah-memilih.html>

Komposisi usia pengguna internet dan media digital dengan pengguna berumur 19-34 sebesar 49.52%. Namun untuk penetrasi terbesar berumur 13-18 sebesar 75.50%.³² Bahkan *politicawave* merilis terjadi 14.603.893 percakapan dan 2.258.354 netizen membicarakan pilgub DKI Jakarta. Basuki - Djarot mendapat sentimen positif (+54,92%, - 45,08%) dibanding Anies Sandi (+44,54%, - 55.46%).³³ Tercatat *trending topic* dan *cutitan* pada twitter Indonesia pada pelaksanaan putaran kedua pilgub DKI Jakarta seperti #PilkadaDKI, Anies-Sandi, DP o, Nyoblos Tanpa Rusuh.³⁴

Agen Sekuritisasi

A. Agen Sekuritisasi

Agen sekuritisasi adalah aktor utama yang bisa mempengaruhi kelompok untuk melakukan tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial dan menjadi kekuatan pencegah konflik dan pembendung terjadinya konflik.

Pada kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, agen sekuritisasi antara lain: presiden Joko Widodo, pasangan calon, pimpinan partai pengusung, Habib Rizieq, tim sukses, pimpinan relawan, tokoh masyarakat, tokoh ormas dan tokoh agama.

B. Aktor Fungsional

Aktor Fungsional merupakan pihak yang mempengaruhi hubungan dinamis antara Aktor Sekuritisasi dengan kelompok rentan. Pada kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, agen sekuritisasi antara lain: Pemerintah Daerah, Kepolisian, KPU, bawaslu, pengawas independen, relawan demokrasi, akademisi, dan pihak lain yang tidak mendukung politik identitas.

C. Kelompok Rentan

Kelompok Rentan adalah kelompok atau kumpulan orang yang dianggap oleh aktor sekuritisasi sebagai rentan terhadap ancaman keamanan eksistensial. Pada kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, kelompok rentan ini antara lain: umat muslim, etnis lokal atau

³² Siaran Pers NO. 53/HM/KOMINFO/02/2018 tentang Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband. Online. Dapat diakses di: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/o/siaran_pers

³³ Ayu, Maya. 2017. Pilkada DKI: *politicawave*, Ahok Djarot Unggul di Media Sosial. Dapat diakses di:

www.pilkada.tempo.co/amp/866368/pilkada-dki-politica-wave-ahok-djarot-unggul-di-media-sosial (diakses pada oktober 2018)

³⁴ Hidayat, Muhammad Wahyu. 2017. Di Medsos Pendukung Ahok Dominan, Anies Unggul Jumlah Pemilih. Online. Dapat diakses di: www.m.liputan6.com/amp/2925648/di-medsos-pendukung-ahok-dominan-anies-unggul-jumlah-pemilih (diakses pada oktober 2018)

pribumi, etnis tionghoa, korban ketidakadilan, kelompok miskin, dan pengangguran.

Pemilihan umum sebagai pengenalan politik demokratis dapat dengan mudah digunakan sebagai instrumen memobilisasi etnis, mengubah pemilihan umum menjadi konflik “kami” melawan “mereka”.³⁵

Potensi Konflik Sebelum Pemungutan Suara

Sebelum pemungutan suara ini tercatat beberapa potensi konflik. Potensi konflik ini dilatar belakangi dengan berbagai faktor penyebab. Potensi yang muncul pada fase ini antara lain: ketidaksukaan dan penolakan kepemimpinan Basuki, isu SARA dan penistaan agama, demonstrasi massa penjarakan Ahok, sampai *money politic* dan kampanye negatif dan hitam di dunia maya dan nyata.

Ketidaksukaan terhadap personal dan kepemimpinan Basuki, banyak masyarakat membenarkan hal ini terbukti dalam beberapa jajak pendapat (sejak februari 2016) dihasilkan masyarakat tidak menyukai

gaya kepemimpinan Basuki yang terlihat kasar berkomunikasi, dan tidak menjadi pemimpin yang teladan sebagaimana disampaikan oleh Eep Saepulloh dari polmark dalam sebuah wawancara.³⁶

Potensi Konflik Saat Pemungutan Suara

Pada fase pemungutan suara, potensi konflik yang muncul antara lain: profesionalisme penyelenggara pemilu, DPT ganda, pemilih yang tidak tercatat di DPT, gangguan pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara. Potensi ini termanifestasikan ke dalam beberapa kejadian di lapangan.

Konflik yang diakibatkan profesionalisme penyelenggara dan proses penyelenggaraan pemilu saat pemungutan putaran pertama, misalnya di berbagai TPS. Masyarakat tidak terdata dalam DPT yang ditetapkan KPU Provinsi DKI Jakarta yang diakibatkan masih ada masyarakat yang belum melakukan perekaman penduduk seperti terjadi di TPS 88 dan 89 Cengkareng Barat di rusunawa Marunda.³⁷

³⁵ Haris, Peter dan Ben reily. 2000. Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator. Depok: Aameepro. Hal. 19

³⁶ Zen RS. 2017. “Eep Saefulloh Fatah: Saya Tidak Mengkapitalisasi Sentimen SARA”. Dalam: <https://tirto.id/saya-tidak-mengkapitalisasi-sentimen-sara-cso6> (diakses pada 10 November 2018)

³⁷Tashandra, Nabilla. “Sumarsono: Pilkada Serentak 2017, DPT Pilkada DKI Paling Bermasalah”. Dalam:

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/15425971/sumarsono.pilkada.serentak.2017.dpt.pilkada.dki.paling.bermasalah>. (diakses pada 10 November 2018). Yusuf, Yan. “Karut Marut DPT Pilgub DKI, KPU Langgar Konstitusi Warga”. Dalam: <https://metro.sindonews.com/read/1180977/171/karut-marut-dpt-pilgub-dki-kpu-langgar-konstitusi-warga-1487339577> (diakses pada 10 November 2018)

Selain itu di TPS 17 di kawasan Petamburan Jakarta Barat terjadi ketegangan antara warga dan ketua KPPS yang disebabkan kinerja panitia dan penguasaan aturan pemilu yang tidak jelas.³⁸

Selain itu terjadi pemilih ganda dan pemalsuan identitas pemilih juga terjadi di lapangan dan diproses tindak pidana pemilu.

Potensi Konflik Setelah Pemungutan Suara

Pada fase pasca pemungutan suara, tidak terjadi konflik akibat kekecewaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu, serta ketidakpuasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu. Semua pihak bersikap dewasa dan legowo menerima hasil pemilihan umum dan proses hukum yang menjerat.

Hal ini diwujudkan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh pasangan Basuki – Djarot yang mengakui kekalahan dengan mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih Anies – Sandi, dan meminta para pendukungnya bersikap dewasa dan mendukung sepenuhnya pemimpin Jakarta terpilih.³⁹ Basuki Tjahja juga mengaku mengikuti proses hukum terkait kasusnya dan meminta pendukungnya untuk tidak

melakukan tindakan yang negatif dan kekerasan kepada siapapun.

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

Peran Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan Konflik di DKI Jakarta adalah sebuah keharusan untuk menjaga stabilitas sosial, politik dan ekonomi di wilayah pemerintahannya yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa konflik.

Program pencegahan pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik antara lain: a) pelaksanaan rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial; b) deteksi dini konflik; c) pemetaan dan pendeteksian wilayah konflik di Jakarta; d) melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (menghimbau masyarakat menjunjung demokrasi yang sehat dan terhindar dari hoaks dan isu sara); d) koordinasi dengan forum binaan bakesbangpol; dan e) pembentukan pos komando bersama pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Peran pencegahan konflik yang dilakukan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta

³⁸ BBC Indonesia. "Pilkada DKI: Kisruh di TPS Rizieq Shihab, Ketua PPS sempat diusir". Dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39638093> (Diakses pada 12 Oktober 2017)

³⁹ Aziza, Kurnia. 2017. Berguyon dan Legawa, Cara Ahok-Djarot Terima Kekalahan. Diakses di:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/09043481/berguyon.dan.legawa.cara.ahok-djarot.terima.kekalahan>

berdasarkan rangkaian pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017, antara lain:

A. Pencegahan Konflik Sebelum Pemungutan Suara

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendeteksi potensi konflik sampai melakukan pencegahan terjadinya konflik pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Upaya yang dilakukan Bakesbangpol dalam pencegahan konflik pada pilgub DKI Jakarta, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagai *leading sector* penanganan konflik sosial di daerah. Sesuai amanat Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 tahun 2012, bahwa proses pencegahan konflik dapat dilakukan dengan cara: a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c) meredam potensi Konflik; dan d) Membangun sistem peringatan dini.⁴⁰

Upaya dan kegiatan tersebut, antara lain:

- Pemetaan dan deteksi dini potensi konflik yang dilakukan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta

diimplementasikan dalam program pemetaan potensi konflik. Namun program tersebut hanya sampai tahun 2015 saja dan tidak dilanjutkan dikarenakan keterbatasan anggaran. Adapun kaitannya pilgub DKI Jakarta, bakesbangpol berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian yang melakukan pemetaan kerawanan pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta.

- Pembentukan pos komando bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melalui surat keputusan gubernur nomor 125 tahun 2017 tentang Pembentukan Pos Komando (Posko) Bersama. Posko bersama ini terdiri dari posko bersama tingkat provinsi sampai kelurahan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terpantau berjalan lancar. Selain itu, posko bersama ini melakukan koordinasi dan konsolidasi baik bulanan maupun insidental sesuai dengan tahapan pemilu.
- Bakesbangpol melakukan pendidikan politik kepada berbagai kelompok masyarakat. Penyampaian pendidikan politik ini dalam bentuk seminar, sosialisasi, diskusi publik dan berisi

⁴⁰ Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial, Pasal 6.

himbauan pada masyarakat untuk menjunjung demokrasi yang sehat dan terhindar dari hoaks dan isu SARA, serta mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan.

- Bakesbangpol pun melakukan koordinasi dengan forum-forum dibawah pembinaan bakesbangpol seperti: FKDM, FKUB dan lain-lain. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) sebagai mata dan telinga pemerintah dalam membangun kewaspadaan dini di masyarakat. Saat ini, FKDM Provinsi DKI Jakarta masih belum menemukan pola komunikasi dan strategi kerja organisasi yang tepat.
- Bakesbangpol bersama TNI Polri menangani demonstrasi penistaan agama seperti aksi 411 dan 212, dengan senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan pendemo terkait massa dan tuntutan serta memberikan layanan fasilitas demonstrasi seperti tempat asprasi dan lain sebagainya.
- Bakesbangpol berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penegakan hukum yang menjerat Basuki. Namun tetap menghargai proses pemilu yang sedang dijalani oleh tersangka dengan memberi kesempatan menyelesaikan rangkaian

pemilu dan tetap mengkondisikan masyarakat agar tetap kondusif.

- Bakesbangpol pun memantau KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu. Pemantauan bakesbangpol terhadap penyelenggara pemilu tidak berhenti pada proses pendaftaran saja, namun tetap dilakukan sampai kampanye, pemungutan suara dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum.
- Himbauan dan pengawasan Bakesbangpol melalui Plt gubernur DKI Jakarta kepada aparat sipil negara agar menjaga netralitasnya dan ada sanksi berat jika terbukti tidak netral. Terlebih salah satu pasangan calon adalah petahana.

B. Pencegahan Konflik Saat Pemungutan Suara

Pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terdapat potensi lain yang menimbulkan konflik pada pemungutan suara pilgub DKI Jakarta. Misalnya saja masih terjadinya *money politic*, penyelenggara pemilu yang kurang profesional, kualitas pemilu di masyarakat, dan kesiapan penyelenggara. Terkait dengan potensi lain itu, Bakesbangpol memiliki peran yang sentral. Peran sentral tersebut ditunjukkan dalam keberadaan bakesbangpol sebagai pemimpin dalam

struktur posko bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang di dalamnya terdapat penyelenggara pemilu.

Bakesbangpol tidak memiliki kebijakan langsung dalam pengerahan anggota, maka bakesbangpol berkoordinasi dengan KPUD, Bawaslu DKI Jakarta, Kepolisian dan Kejaksaan, dalam rapat koordinasi posko bersama agar pihak terkait menindaklanjuti secara langsung permasalahan pelaksanaan pemilihan umum yang termasuk tindak pidana dan non pidana di lapangan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Bakesbangpol terlihat tidak memiliki sistem operasional pencegahan konflik yang ideal dan terintegrasi. Padahal, operasional dari pencegahan konflik adalah terbentuknya kerangka kerja pencegahan konflik atau *conflict prevention framework*.⁴¹

C. Pencegahan Konflik Setelah Pemungutan Suara

Strategi pencegahan konflik dapat berupa kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik jangka panjang seperti regulasi mengenai kebijakan dan

strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya untuk tidak terjadinya konflik.⁴² Khususnya prosedur yang lebih baik dan berkaitan dengan penanganan konflik dalam konteks Pemilihan umum, karena pada tahun 2019 Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi berupa pemilihan umum serentak baik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

Ketegangan pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 tidak berhenti pada proses pemungutan suara. Akan tetapi, terus dipelihara dengan berbagai aksi demonstrasi massa yang dipimpin oleh pimpinan GNPf MUI sampai tercapainya keinginan agar Basuki divonis sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Maka dari itu, Bakesbangpol terus berkoordinasi kepada instansi terkait lainnya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih besar dan berdampak panjang dalam kehidupan sosial politik masyarakat Jakarta.

Salah satu tugas bakesbangpol adalah menciptakan iklim masyarakat yang bersatu dan damai dengan latar belakang apapun. Pekerjaan rumah

⁴¹ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. P2P LIPI kunjungi komisi 1 DPR RI. Online. Tersedia di: <http://lipi.go.id/berita/p2p-lipi-kunjungi-komisi-i/5783>

⁴² Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2015. Laporan Akademik II kerangka Pencegahan konflik di Indonesia. Online. Tersedia di: <http://lipi.go.id/publikasi/laporan-akademik-ii-kerangka-pencegahan-konflik-di-indonesia/14712>

tentang intoleransi, *prejudice*, dan diskriminasi antar masyarakat suku bangsa dan agama, yang harus diresolusi segera agar tidak menjadi konflik yang besar di kemudian hari. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sudah mulai melakukan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengurangi ketegangan dari pilgub DKI Jakarta silam kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti seminar bela negara bagi OKP, kegiatan kebhinekaan bagi FKUB dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Bakesbangpol Jakarta dalam pencegahan konflik di Jakarta: studi kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, maka kesimpulan yang dibuat antara lain:

Pertama, potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 meliputi ketidakadilan dan penilaian pemimpin, isu SARA dan penistaan agama, Netralitas ASN, profesionalitas penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu serta konflik kepentingan dan kekuasaan. Isu SARA yang menyeruak di masyarakat hanya berkuat pada isu agama dan ras saja serta hanya ditujukan kepada sosok Basuki Tjahja saja. Potensi konflik yang muncul ini disusun berdasarkan deteksi potensi konflik, dan

pemetaan faktor penyebab konflik dengan melakukan analisis faktor struktural dan analisis aktor sekritisasi konflik.

Kedua, peran badan kesatuan bangsa dan politik pada pencegahan konflik di DKI Jakarta, dalam konteks Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan baikk mandiri maupun bersinergi. Upaya pencegahan dan penanganan konflik dilakukan dalam bentuk deteksi dini, peringatan dini dan tanggap dini.

Rekomendasi

Melihat hasil penelitain yang didapatkan dan kesimpulan yang dirangkum, maka rekomendasi penelitian ini antara lain:

Pertama, melihat vitalnya peran Bakesbangpol dalam proses pencegahan dan penyelesaian konflik khususnya mengenai isu pilkada, kajian selanjutnya dapat membahas mengenai optimalisasi dan evaluasi peran Bakesbangpol DKI Jakarta dalam penanganan konflik sosial di DKI Jakarta, khususnya kajian mengenai konflik politik yang selama ini membuat ketegangan di DKI Jakarta.

Kedua, gubernur DKI Jakarta termasuk bakesbangpol segera melakukan program rekonsiliasi bagi masyarakat DKI Jakarta

setelah terpecah pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 sebelum memanas pada Pilpres tahun 2019. Misalnya dengan kebijakan *cross-cutting affiliation* dan *cross-cutting loyalties*, baik itu antar lintas agama, suku, ras maupun pilihan politik.

Ketiga, Optimalisasi peran Forum binaan Bakesbangpol baik secara program maupun manajerial sehingga dapat menjadi tangan kanan Bakesbangpol yang efektif dalam menjaga stabilitas sosial politik di DKI Jakarta.

Keempat, Optimalisasi upaya pencegahan konflik melalui program deteksi dini, peringatan dini dan Tanggap dini. Optimalisasi ini diantaranya dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan memanfaatkan modal sosial masyarakat. Sehingga Jakarta menjadi kota yang nyaman dan maju baik warga maupun kotanya, serta sensitif konflik.

Kelima, Optimalisasi program bela negara dengan menysasar semua kelompok masyarakat Jakarta (tidak hanya elit saja) terutama kelompok yang sempat bersitegang pada Pilgub DKI Jakarta dalam rangka penguatan sumber daya pertahanan negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Haris, Peter dan Ben reily. 2000. Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator. Depok: Ameenpro
- Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, Bawaslu RI
- KPU Provinsi DKI Jakarta. 2018. Data dan Infografik Pilkada Jakarta 2017
- Program peace Through Development dan Institut Titian Perdamaian. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia. Jakarta: Peace Through development – BAPPENAS
- Rambostham, Oliver et al. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity press
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Prenada Media
- Thung Ju Lan et. al. 2011. Panduan Implementasi Kebijakan tentang Kerangka Kerja Pencegahan Konflik. Jakarta. Penerbit Penelitian Politik LIPI

Aturan Hukum

- Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012
- Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No 171 Tahun 2007
- Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial, Pasal 6

Jurnal

Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, 3-6.

BPS DKI Jakarta. 2017. <https://jakarta.bps.go.id/statictable/2017/01/24/91/3-1-2-jumlah-penduduk-dan-rasio-jenis-kelamin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html>

Rikson H. Nababan. 2016. *Jurnal Bawaslu DKI*. Edisi Oktober 2016 hal. 50

Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1,

Website

Ayu, Maya. 2017. Pilkada DKI: politicawave, Ahok Djarot Unggul di Media Sosial. Dapat diakses di: www.pilkada.tempo.co/amp/866368/pilkada-dki-politica-wave-ahok-djarot-unggul-di-media-sosial (diakses pada oktober 2018)

Aziza, Kurnia. 2017. Berguyon dan Legawa, Cara Ahok-Djarot Terima Kekalahan. Diakses di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/09043481/berguyon.dan.legawa.cara.ahok-djarot.terima.kekalahan> (diakses pada oktober 2018)

BBC Indonesia. "Pilkada DKI: Kisruh di TPS Rizieq Shihab, Ketua PPS sempat diusir". Dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39638093> (Diakses pada 12 Oktober 2017)

Beritagar.id. "Populasi Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Agama". tersedia di: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/populasi-penduduk-dki-jakarta-berdasarkan-agama-1520252043> (diakses pada oktober 2018)

BPS Republik Indonesia. "Kewarganegaraan penduduk Indonesia". Terdapat di: <http://Sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html> (diakses pada oktober 2018)

BPS Republik Indonesia. "Data DKI Jakarta 2017 (Metode Baru)". Tersedia di: <http://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/3100> (Diakses pada oktober 2018)

Gabrillin, Abba. 2017. Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Penurunan, Ini Penyebabnya. Dapat diakses di: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/12240901/indeks-demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya> (diakses pada oktober 2018)

Hidayat, Avit. 2017. Penyebab Ahok Kalah versi Dua Peneliti Australia. Online. Dapat diakses di: <http://www.pilkada.tempo.co/amp/868728/penyebab-ahok-kalah-versi-dua-peneliti-australia> (diakses pada oktober 2018)

Hidayat, Muhammad Wahyu. 2017. Di Medsos Pendukung Ahok Dominan, Anies Unggul Jumlah Pemilih. Online. Dapat diakses di: www.m.liputan6.com/amp/2925648/di-medsos-pendukung-ahok-dominan-anies-unggul-jumlah-pemilih (diakses pada oktober 2018)

Kompas.com. 2017. Ada 308 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada pilkada DKI 2017. Dapat diakses di: <https://megapolitan.kompas.com/read>

- [/2017/05/03/19075161/Ada.308.temuan.dan.laporan.dugaan.pelanggaran.pada.a.pilkada.DKI.2017](#) (diakses pada oktober 2018)
- Laporan Survei Pilgub DKI Jakarta. Persepsi dan perilaku pemilih menjelang Pilgub DKI Jakarta 2017. 6-10 Februari 2017. Poltracking Indonesia. Dapat diunduh di www.poltracking.com
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. P2P LIPI kunjungi komisi 1 DPR RI. Online. Tersedia di: <http://lipi.go.id/berita/p2p-lipi-kunjungi-komisi-i/5783>
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2015. Laporan Akademik II kerangka Pencegahan konflik di Indonesia. Online. Tersedia di: <http://lipi.go.id/publikasi/-laporan-akademik-ii-kerangka-pencegahan-konflik-di-indonesia/14712>
- Mashabi, Sania. 2017. Survei: Ahok dianggap paling kompeten, tapi warga ogah memilih. Online. Dapat diakses di: <http://merdeka.com/amp/politik/survei-ahok-dianggap-paling-kompeten-tapi-warga-ogah-memilih.html> (diakses pada oktober 2018)
- Sarwanto, Abi. 2016. Pengamat: Tipe Pemilih DKI Jakarta Rasional. Online. Dapat diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160208202453-32-109613/pengamat-tipe-pemilih-dki-jakarta-rasional> (diakses pada oktober 2018)
- Sari, Nursita. 2017. LBH Jakarta: Ahok Mungkin Pecahkan Rekor Penggusuran oleh Pemprov DKI. Online. Dapat diakses di: www.megapolitan.kompas.com/read/2017/04/13/13405181/lbh.jakarta.ahok.mungkin.pecahkan.rekor.penggusuran.oleh.pemprov.dki (diakses pada oktober 2018)
- Siaran Pers NO. 53/HM/KOMINFO/02/2018 tentang Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband. Online. Dapat diakses di: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/o/siaran_pers (diakses pada oktober 2018)
- Tashandra, Nabilla. "Sumarsono: Pilkada Serentak 2017, DPT Pilkada DKI Paling Bermasalah". Dalam: <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/15425971/sumarsono.pilkada.serentak.2017.dpt.pilkada.dki.paling.bermasalah>. (diakses pada 10 November 2018)
- Yusuf, Yan. "Karut Marut DPT Pilgub DKI, KPU Langgar Konstitusi Warga". Dalam: <https://metro.sindonews.com/read/1180977/171/karut-marut-dpt-pilgub-dki-kpu-langgar-konstitusi-warga-1487339577> (diakses pada 10 November 2018)
- Zen RS. 2017. "Eep Saefulloh Fatah: Saya Tidak Mengkapitalisasi Sentimen SARA". Dalam: <https://tirto.id/saya-tidak-mengkapitalisasi-sentimen-sara-cso6> (diakses pada 10 November 2018)
- Zulfikar. 2016. Tiga Jenis Pemilih di Pilkada Serentak: Tipe Psikologis Pilih yang Gateng, Tegas, Santun. Dapat diakses di: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/11/tiga-jenis-pemilih-di-pilkada-serentak-tipe-psikologis-pilih-yang-gateng-tegas-santun> (diakses pada oktober 2018)

